

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan

Wilda Sri Munawaroh Harahap

Fakultas Ekonomi

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Korespondensi: wildasri@umnaw.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4954>

Abstrak: Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan peran aktif masyarakat untuk membangun negara, pemerintah mengeluarkan peraturan PP No 46 Tahun 2013 (direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018) tentang PPh Final UMKM. PPh Final UMKM ini diperuntukan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 milyar per tahun. Adapun tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Data penelitian ini bersumber dari data skunder atau time series yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Model analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah (1) Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (2) Investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (3) PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (4) Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (5) Jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

Kata Kunci : Penerimaan PPh Final UMKM, Jumlah Wajib Pajak yang Membayar, Investasi, PDRB, Inflasi

Abstract : To increase tax revenue and the active role of the community in developing the country, the government issued regulation PP No 46 of 2013 (revised to PP No. 23 of 2018) concerning MSME Final PPh. This MSME Final PPh is intended for individual and corporate taxpayers who have a turnover of not more than Rp. 4.8 billion per year. The purpose of this study is to examine and analyze the effect of the number of taxpayers who pay, investment, GRDP and inflation on the acceptance of the Final Income Tax of MSMEs. The data of this study were sourced from secondary or time series data, from 2015 to 2018. The model of data analysis in this study is multiple linear regression. The results of the study are (1) The number of taxpayers paying influences the UMKM Final Income Tax revenue, (2) The investment influences the UMKM Final PPh revenue, (3) The GRDP influences the UMKM Final PPh revenue, (4) Inflation has no effect on the receipt of Final PPh UMKM, (5) The number of taxpayers who pay, investment, GRDP and inflation together affect the income of the Final Income Tax of UMKM.

Keywords: UMKM Final PPh Receipt, Number of Taxpayers Paying, Investment, GRDP, Inflation.

Cara Sitasi : Harahap, Wilda Sri Munawaroh. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Final UMKM di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 74-81 <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4954>

PENDAHULUAN

Setiap daerah tentu memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing daerahnya. Hal ini disebabkan oleh potensi suatu daerah yang berbeda-beda, sehingga suatu daerah boleh jadi memiliki potensi yang lebih besar dari daerah lainnya, termasuk pula potensi keuangannya (Alpi dan Ramadhan, 2018). Dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. (Ramadhan, 2019). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain dari penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sumber penerimaan tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk kemakmuran seluruh rakyatnya, di mana hal tersebut tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Peran pemerintah dalam mengelola penerimaan negara dan belanja negara memerlukan rencana yang baik untuk memaksimalkan potensi yang ada di negaranya sendiri. Peran penerimaan pajak yang meningkat semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan. Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak pusat meliputi jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Adapun PPh Final UMKM merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu seperti yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2). PPh final pada 4 ayat (2) itu sendiri dimana pengenaan pajaknya dianggap telah selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan ke kas negara. Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen (sebelumnya 1 persen setelah keluarnya PP No. 23 Tahun 2018 menjadi 0,5 persen) dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKMSehubungan dengan tujuan PPh Final UMKM, pembuat peraturan mengharapkan dengan adanya peraturan ini maka: a) memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan; b) mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi; c) mengedukasi masyarakat untuk transparansi; dan d) memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Di Sumatera Utara sendiri khususnya daerah kota Medan yang merupakan termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Adapun perkembangan UMKM yang ada di Kota Medan sendiri pada tahun 2009 ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM dan terus meningkat menjadi 300 ribu pada tahun 2015 (www.sumut.antaraneews.com) Dari jumlah UMKM yang diterangkan tersebut sekitar 55-60 persen bergerak di bidang usaha kuliner. Dari keterangan di atas dapat terlihat masih adanya potensi dan peluang dalam penerimaan PPh Final UMKM karena masih adanya jumlah Wajib Pajak yang belum mendaftarkan maupun dalam membayar pajaknya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumut I yang wilayah kerjanya meliputi kota Medan, kota Binjai dan kota Tebing Tinggi. Adapun dalam penelitian ini hanya memasukan wilayah kota Medan sebagai tempat penelitian yang terdiri dari tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak di kota Medan. Kota Medan merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara dan salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki tingkat pembangunan yang cukup tinggi di bandingkan daerah lain di Sumatera Utara.

Terkait setelah dikeluarkannya PPh Final UMKM, bagaimana perkembangan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Medan Polonia setiap tahun terus naik. Namun berdasarkan data tersebut secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata jumlah penerimaan dibagi dengan jumlah wajib pajak setiap tahunnya menurun. Mulai dari 1,35 persen pada tahun 2015 turun menjadi minus 0,14 persen pada tahun 2018. Berdasarkan sumber data statistik yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kota Medan menunjukkan pada tahun 2015 sampai dengan 2018 terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadinya penurunan nilai investasi, dimana nilai investasi pada tahun 2013 sebesar Rp 1.768 Milyar, turun menjadi Rp 411 Milyar pada tahun 2014, naik sedikit pada tahun 2015 sebesar Rp 2.044 Milyar. Dan pada tahun 2016 naik secara signifikan menjadi Rp 3.663 Milyar. Hal ini menunjukkan tidak meratanya nilai investasi dari tahun ke tahun tergantung realisasi proyek dan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Pengertian Pajak Dalam Undang-Undang KUP diterangkan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang membayar pengeluaran umum. Terkait kebijakan pajak terhadap pengusaha kecil, selain kebijakan di bidang PPh di atas, pemerintah juga memberikan kebijakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu dengan pengaturan batasan sebagai Pengusaha Kecil yang tidak termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam pelaksanaannya, guna memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.03/2013, telah disesuaikan nilai atau besaran menyangkut batasan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut dari semula Rp 600 juta, naik 700% menjadi Rp 4,8 Milyar, yang berlaku mulai 1 Januari 2014.

Dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 setelah direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018, tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Maka dengan peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam sektor-sektor tertentu. Berdasarkan keterangan dasar hukum peraturan-peraturan yang telah diterangkan di atas maka diambillah pokok-pokok utama dalam penerapan PPh Final UMKM dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset). Pada intinya penerbitan PPh Final UMKM ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan asosiatif secara kuantitatif. yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun juga hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Data yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk proses penelitian, yaitu berupa data dari jumlah wajib pajak yang membayar dan penerimaan PPh final UMKM Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*) (Syofian Siregar, 2013). Alat yang digunakan dalam mengelola data tersebut menggunakan software SPSS. (*Statistical Program for Special Science*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis adalah regresi linier berganda. Uji regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh ataupun dampak antara variable *independent* terhadap variable *dependent*. yang mana. hasil persamaan regresi linier berganda dalam pengujiannya menggunakan program SPSS. Dengan *output* dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-15577.767	4892.717		-3.184	.003
Jumlah wajib pajak yang membayar	.442	.204	.243	2.161	.036
Investasi	.011	.004	.393	2.916	.006
PDRB	.001	.000	.345	2.279	.028
Inflasi	-131.072	366.204	-.018	-.358	.722

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta (α) = -15.577,767, kofisien regresi jumlah wajib pajak yang membayar (β_1) = 0,243 kofisien regresi investasi (β_2) = 0,393, kofisien regresi PDRB (β_3) = 0,345 dan kofisien regresi inflasi (β_4) = -0,18 sehingga diperoleh persamaan regresi berganda :

$$Y = -15.577,767 + 0,243X_1 + 0,393X_2 + 0,345X_3 - 018 X_4 .$$

Interpretasi terhadap persamaan tersebut adalah :

1. Nilai -15.577,767 adalah nilai konstanta yang artinya ketika variabel jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi adalah tetap maka besarnya penerimaan PPh Final UMKM sebesar -15.577,767.

2. Nilai koefisien regresi β_1 pada variabel jumlah wajib pajak (X_1) sebesar 0,442 memberikan arti bahwa bila faktor jumlah wajib pajak yang membayar naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar 0,442.
3. Nilai koefisien regresi β_2 pada variabel investasi (X_2) sebesar 0,011 memberikan arti bahwa bila faktor investasi naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar 0,011.
4. Nilai koefisien regresi β_3 pada variabel PDRB (X_3) sebesar 0,001 memberikan arti bahwa bila faktor PDRB naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar 0,001.
5. Nilai koefisien regresi β_4 pada variabel inflasi (X_4) sebesar $-131,072$ memberikan arti bahwa bila faktor investasi naik sebesar 1 satuan dapat menurunkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar $-131,072$.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel IV-8 di atas hasil output menunjukkan hasil:

1. Variabel jumlah wajib pajak yang membayar (X_1) diperoleh $t_{hitung} = 2,161 > t_{tabel} = 2,0153$. Maka keputusannya menerima H_a dan H_o ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM (Y). Output menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Maka hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah diterangkan sebelumnya bahwa jumlah wajib pajak berkorelasi positif dalam meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM
2. Variabel investasi (X_2) dengan nilai $t_{hitung} = 2,916 > t_{tabel} = 2,0153$. Maka keputusannya adalah menerima H_a dan H_o ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM (Y). Output menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi berkorelasi positif dalam meningkatkan produktivitas baik penjualan maupun tingkat upah. Sehingga penjualan dan tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.
3. Variabel PDRB (X_3) dengan nilai $t_{hitung} = 2,279 > t_{tabel} = 2,0153$. Maka keputusannya adalah menerima H_a dan H_o ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM (Y). Output menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Maka dengan demikian semakin tinggi PDRB secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah mengalami peningkatan Jadi semakin meningkatnya PDRB di suatu wilayah maka potensi dalam penerimaan PPh Final UMKM semakin besar.
4. Variabel inflasi (X_4) dengan nilai $t_{hitung} = -0,358 < t_{tabel} = 2,0153$. Maka keputusannya adalah menolak H_a dan H_o diterima. Sehingga output ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM (Y). Output menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Jika dilihat dari output di atas tersebut maka Inflasi berkorelasi negatif terhadap penerimaan PPh Final UMKM karena kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Sehingga inflasi itu sendiri tidak berpengaruh terhadap PPh Final UMKM.

Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.209E9	4	3.023E8	95.629	.000 ^a
	Residual	1.359E8	43	3161085.377		
	Total	1.345E9	47			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai $F_{hitung} = 95,629$ lebih besar dari nilai $F_{tabel} = 2,57$ ($df_1 = 4$; $df_2 = 44$) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama jumlah wajib pajak yang membayar (X_1), investasi (X_2), PDRB (X_3) dan inflasi (X_4) berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM (Y). *Bottom Line*.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.897	.888	1,791.304

a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari nilai *R Square* yaitu 0,897 sehingga dapat diketahui bahwa penerimaan PPh final UMKM dapat dijelaskan oleh jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi sebesar 89,7% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain sebesar 11,9% yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah wajib pajak UMKM yang membayar, berperan penting dalam penerimaan PPh final UMKM .
2. Investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang

produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan omzet pelaku UMKM dan kesejahteraan masyarakat sehingga akhirnya memberi kontribusi kepada penerimaan Negara berupa pajak khususnya PPh Final UMKM.

3. PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak terutama PPh Final UMKM
4. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini belum dapat membuktikan Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM
5. Jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Peningkatan investasi sendiri mengakibatkan peningkatan produksi sehingga pertumbuhan PDRB meningkat pula. Dan pada akhirnya inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. Firza., Puja Rizqy Ramadhan. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan: Volume 2, Nomor 3, 2018*.
- Albertus Tandilino. (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 e-ISSN: 2502-5171*.
- Almira Herna Renata, d. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9, No. 1, 7*.
- Billy Ivan Tansuria. (2011). *PAJAK PENGHASILAN FINAL : Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deddy Rustiono. (2008). *Tesis: Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Semarang.
- Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Pratikum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwi Sundi Marliyanti dan Sudarsana Arka. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *E-Jurnal EP Unud, 3 [6] : 265-271, ISSN: 2303-0178*.
- Fadli Hakim dan Grace B. Nangoi. (2015). Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.3 No. 1 Maret 2015, ISSN 2303-1174, Hal 787-795*.

- Kadir. (2015). *Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KBBI Daring: Pencarian. (2016). Retrieved 11 21, 2017, from www.kbbi.kemdikbud.go.id.
- Kementerian Koperasi: Baru 397 Ribu UMKM Bayar Pajak dari 59 Juta. (2017, 9 8). Retrieved 12 22, 2017, from www.pembiayaan.depkop.go.id.
- LKPP. (2016). *Laporan Tahunan Direkotart Jenderal Pajak*. Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit ANDI.
- Ramadhan, Puja Rizqy. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5 (1): 81-87